

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Berdasarkan apa yang menjadi pandangan Talijiduhu sebelumnya dapat menggerakkan semua lembaga-lembaga untuk melayani, memberdayakan, serta memperbaiki pembanguna khususnya lembaga pendidikan. dalam menjalankan amanah UUD 1945 (Talijiduhu 2011:75)

Lembaga pendidikan adalah salah satu harapan besar bagi negeri ini agar bisa bangkit dari keterpurukan dalam semua aspek kehidupan dan bahkan pendidikan memiliki dampak tiga kali lebih kuat dibanding usaha-usaha lainnya dalam meningkatkan pendidikan yang lebih bernilai dan mementingkan apa yangt kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. sehingga menjadi penentu bagi pencapaian kemajuan suatu bangsa dan peningkatan taraf hidup. Bangsa Indonesia menyadari tertuang dalam konstitusi, tetapi juga dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah maju. Sehingga pendidikan bisa bernilai dan lebih bermakna. (Ali Imron 2012:10)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ali Imron Lembaga pendidikan mempunyai kontrol untuk bagaimana kemudian melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada masa saat ini, sehingga akan ada yang namanya kontribusi lembaga pendidikan kepada pendidikan yang mementingkan nilai-nilai

dan keadaan masyarakat. Permasalahan pendidikan yang dari tahun ketahun memberikan begitu banyak warna dan banyak meresahkan masyarakat yang sebagian masalah pendidikan ini terjadi diakibatkan kurangnya perhatian dari lembaga-lembaga pendidikan terhadap perkembangan pendidikan dalam setiap daerah masing-masing. Hal ini di catat oleh sejarah pendidikan Indonesia telah mengalami banyak dinamikanya sendiri seiring dengan perjalanan bangsa indonesia itu sendiri. Kadang bisa di ukur kualitas kemampuan dan watak bangsa dengan melihat kecenderungan pendidikanya. Kualitas pendidikan yang relatif baik bisa menghasilkan *output* yang relatif baik juga. Demikian sebaliknya pendidikan yang relatif kurang baik akan menghasilkan *output* yang kurang memadai. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Salah satu elemen penting yang mendukung kemajuan tersebut adalah pendidikan, sebab pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila *output* dari proses pendidikan itu berhasil maka kemajuan pun ada di depan mata. Sayangnya hal tersebut belum terjadi di Indonesia.

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari yang diharapkan terutama di Kabupaten Boalemo. Berbagai masalah masih sering terjadi, mulai dari sarana yang tidak memadai, membengkaknya anak putus sekolah, kurikulum yang selalu berubah, ketidakprofesionalan para pendidik, sampai kepribadian peserta didik yang kurang terpuji. Namun hal yang paling menambah buramnya pendidikan di negara ini adalah masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi

masyarakat miskin. Memang di zaman sekarang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas baik biasanya harus menelan biaya yang tidak sedikit. Tidak diingkari bahwa tiap tahunnya, hampir semua jenjang pendidikan terus mengalami kenaikan biaya. Pledoi yang digunakan kurang lebih sama, karena biaya untuk sarana dan prasarana pendidikan tidaklah murah. Selain itu, akreditasi yang ditetapkan oleh negara dijadikan ajang kompetisi untuk membangun lembaga pendidikan berperspektif komersial. Akhirnya, mahalny biaya pendidikan ini pun menjadi paradoks bagi konstitusi negara kita.

Berbagai permasalahan yang kemudian terjadi di tataran pendidikan, tidak heran banyak oknum yang berpendapat mengenai bobroknya sistem pendidikan, dan lebih mengarah pada penindasan bagi kaum-kaum yang tertindas. Pendidikan untuk kaum tertindas tidak akan pernah bisa disediakan oleh kaum penindas. Dalam konteks komersialisasi pendidikan, penyedia lembaga pendidikan formal kini adalah pemodal. Karena desakan arus pasar bebas (neoliberalisme) dan pengaruh privatisasi, maka lembaga pendidikan mau tidak mau harus mengambil peran sebagai pemodal. Pemodal dalam terminologi struktur kelas berperan sebagai kelas borjuis. Di mana kelas borjuis merupakan penindas kelas proletar.

<http://fenomenapendidikan.blogspot.com/2010/05/kebobrokan-pendidikan-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 3 desember 2014

Tak heran jika nasib pendidikan kita saat ini tidak pernah beranjak dari status quo. Sehingga substansi pendidikan dalam arti sebenarnya tidak pernah tercapai. Substansi pendidikan itu adalah pencarian akan ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Tetapi ketika sekelompok pemodal melakukan privatisasi terhadap ilmu

pengetahuan, maka substansi pendidikan tidak akan tercapai jika tidak membayar dengan uang

Pemerintah jika diambil dalam konsep *civil servant* dalam konsep ini pemerintah dianggap sebagai sebuah warong (toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan(pembeli) dalam pandangan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyat. yang bisa dikatakan penyelenggara pendidikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan siap melayani rakyat (Talijiduhu 2011:74)

Pendidikan Gratis adalah salah satu program yang di keluarkan oleh Gubernur Gorontalo bapak Rusli Habibie dan bapak Idris Rahim, jika di tinjau dari sisi ekonomi masyarakat kabupaten boalemo program ini sangat membantu bagi rakyat yang ekonominya lemah dan ingin melanjutkan jenjang pendidikan. dengan adanya pendidikan gratis dapat memberikan sedikit solusi dari permasalahan yang terjadi di Gorontalo lebih khususnya di Boalemo, dengan adanya pendidikan gratis maka tidak akan ada agenda komersialisai pendidikan. dengan adanya pendidikan gratis di gorontalo lebih khususnya di boalemo dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk rakyat gorontalo.

Pendidikan gratis yang telah di programkan oleh pemerintah gorontalo ternyata pada faktanya banyak menunjukan permasalahan di tataran sekolah, lebih khususnya di Boalemo, banyak pungutan liar yang kemudian di lakukan oleh sebagian sekolah yang ada di Kabupaten Boalemo. Hal ini mencedrai apa yang kemudian sudah di programkan oleh pemerintah gorontalo, dimana pendidikan di

gratiskan dari tingkat SD,SMP, sampai dengan ke jenjang SMA. Untuk keluar dari masalah ini, butuh partisipasi dan implementasi dari pihak sekolah dan pihak dinas pendidikan, untuk bagaimana kemudian mampu mengontrol dan menjalankan tugas pembantuan dalam hal mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa baik tidaknya pendidikan bukan hanya terpusat pada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, akan tetapi bagaimana peran dinas pendidikan Kabupaten Boalemo dalam menjalankan tugas pembantuan dalam hal implementasi kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat. menyelenggarakan pendidikan harus melihat apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai pendidikan sebagaimana yang diamnatkan dalam UUD 1945.

Kabupaten Boalemo merupakan kabupaten yang tertua yang ada di Provinsi Gorontalo. yang kemudian didirikan pada tanggal 12 oktober tahun 1999. dan tidak terlepas berdasarkan UU No. 50 tahun 1999.

Berdasarkan Profil singkat daerah di atas dapat dilihat bahwa Boalemo merupakan daerah yang sudah lama berkembang. Terkait dengan hal tersebut yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan Lembaga-lembaga daerah yang berada di Kabupaten Boalemo itu antara lain khususnya lembaga pendidikan dalam hal ini yaitu peran Dinas Pendidikan. menjalankan tugas pembantuan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat. Mengapa perlu dipertanyakan hal demikian , karena program

pendidikan gratis tidak akan berjalan baik tanpa ada implementasi dari pihak dinas pendidikan Kabupaten Boalemo dalam menjalankan tugas pembantuan

Dilihat dari pernyataan diatas begitu sangat pentingnya dalam meningkatkan pendidikan gratis, karena dengan meningkatkan pendidikan gratis dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Boalemo. Dan dapat memberikan perubahan yang baik bagi perkembangan masyarakat pada khususnya daerah Kabupaten Boalemo serta dapat membantu rakyat yang bermasalah dengan ekonomi,

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat sebuah judul yakni “ **Peran dinas pendidikan Kabupaten Boalemo dalam menjalankan tugas pembantuan (studi kasus implementasi Kebijakan Pendidikan gratis bagi masyarakat)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran dinas pendidikan Kabupaten Boalemo dalam menjalannkan tugas pembantuan?
2. Apa sejauh ini peran dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan program pendidikan gratis bagi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran dinas pendidikan dalam menjalankan tugas pembantuan.
2. Serta sejauh ini peran dinas pendidikan dalam mengimplementasikan program pendidikan gratis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang sangat di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Boalemo khususnya Dinas Pendidikan.
2. Mampu memberikan referensi bagi Universitas Negeri Gorontalo.
3. Sebagai sumber bahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti mengenai tata cara penulisan karya ilmiah secara baik dan benar, sekaligus merupakan implementasi tanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT), Khususnya Dharma Penelitian.
4. Sebagai bahan masukan bagi kalangan pendidik dalam meningkatkan perannya.
5. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah